

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadarman, 2007. Membangun Budaya Polri, (PT Forum Media Utama, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1991. Standar Acara Pidana. Jakarta : Rineka Cipta
- Amiroeddin Sjarif, 1996, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo,, 1985, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1986, Pengantar Hukum dan Administrasi Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Kemerdekaan.
- Martiman Prodjoamidjojo. 1996. Pengertian Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Paramita.
- Moch. Salam Faisal. 2002. KUHAP Militer di Indonesia. Bandung: Maju Mandar.
- _____. 2004. Pengadilan Militer di Indonesia. Bandung: Maju Mandar.
- Moeljatno. 1987. Standar Hukum Pidana. Jakarta: Pengembangan Literasi.
- M. Yahya Harahap, 2002. Pembicaraan Masalah dan Pelaksanaan KUHAP, Jakarta Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1983, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Naskah Baru, Jakarta.

S.R. Sianturi. 1985. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Sulchan Yasin. 2001. Kamus Fungsional Bahasa Indonesia. Surabaya: Cipta Karya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pedoman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pedoman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pedoman Divisi Perlindungan dan Pengamanan Polri Nomor 11 Tahun 2010.

Surat Pernyataan Kapolri No. Pol : SKEP/723/IX/2004 tentang Tata Tertib Penanganan Demonstrasi Masyarakat, Pengawasan Luar Insan Polri dapat dibantu melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)